

Pyongyang *Marathon* Sebagai Instrumen Diplomasi

Publik Korea Utara 2014-2025



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NABILA CANDRITA

20323046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

Pyongyang *Marathon* Sebagai Instrumen Diplomasi

Publik Korea Utara 2014-2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NABILA CANDRITA

20323046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Pyongyang *Marathon* Sebagai Instrumen Diplomasi Publik Korea Utara 2014-2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana
S1 Hubungan Internasional

Pada tanggal 17 Oktober 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc
- 2 Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.Si
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.



Nabila Candrita

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II PYONGYANG <i>MARATHON</i> & DIPLOMASI PUBLIK KOREA	
UTARA.....	18
2.1 Soft power Korea Utara	18

2.2	Diplomasi Publik Korea Utara	23
2.3	Pyongyang <i>Marathon</i> Sebagai Instrumen Diplomasi Publik.....	25
2.4	Strategi Pencitraan Korea Utara Melalui Pyongyang Marathon	29
BAB III STRATEGI DALAM DIPLOMASI PUBLIK KOREA UTARA		35
3.1	Pyongyang <i>Marathon</i> sebagai Representasi <i>Soft Power</i> Budaya Korea Utara	38
3.2	Pyongyang <i>Marathon</i> dan <i>Internalization of Political Values</i> Korea Utara	41
3.3	Pyongyang <i>Marathon</i> dalam Kerangka Kebijakan Luar Negeri Korea Utara (2014–2025).....	43
BAB IV PENUTUP		46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Rekomendasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....		50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rute Resmi Pyongyang Marathon	27
--	-----------

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Peningkatan Jumlah Peserta Asing dalam Pyongyang <i>Marathon</i> 2014-2025	
.....	33

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemanfaatan *Pyongyang Marathon* sebagai instrumen diplomasi publik oleh Korea Utara dalam periode 2014–2025. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana negara yang selama ini dikenal tertutup dan mengalami isolasi internasional berusaha membangun citra positif melalui ajang olahraga internasional. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori diplomasi publik, konsep *soft power* (Nye 2004). Argumen sementara penelitian ini adalah bahwa *Pyongyang Marathon* tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga strategi politik simbolik yang memungkinkan Korea Utara merepresentasikan diri sebagai negara aman, modern, dan terbuka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui penyelenggaraan maraton, Korea Utara berhasil menciptakan ruang diplomasi publik yang memperlihatkan wajah alternatif dari citra negatif yang sering ditampilkan media internasional. Representasi visual, testimoni peserta asing, serta pemilihan rute yang melewati ikon nasional menjadi bagian dari strategi pencitraan yang terstruktur. Meskipun dampak langsung terhadap kerja sama politik formal masih terbatas, *Pyongyang Marathon* berkontribusi pada pelembutan citra Korea Utara dan membuka jalur interaksi non-konfrontatif dengan dunia luar.

Kata-kata kunci: Diplomasi publik, Korea Utara, *Pyongyang Marathon*, *Soft Power*, Citra Internasional

ABSTRACT

This study examines the use of the Pyongyang Marathon as an instrument of sports diplomacy by North Korea between 2014 and 2025. The main issue addressed is how a state known for its isolation and limited international engagement attempts to construct a positive image through an international sporting event. The analysis was conducted with reference to the theory of public diplomacy, the concept of soft power (Nye, 2004), which emphasizes the role of sports as a medium of informal political communication, nation branding, and the projection of national identity to the global community. The preliminary argument of this research is that the Pyongyang Marathon functions not only as a sporting competition but also as a symbolic political strategy that allows North Korea to present itself as safe, modern, and open. The findings demonstrate that through this marathon, North Korea creates a platform for public diplomacy that counters the negative image often portrayed by international media. Visual representation, participants' testimonials, and the carefully selected route passing through national landmarks all contribute to a structured image-building strategy. While the direct impact on formal political cooperation remains limited, the Pyongyang Marathon contributes to softening North Korea's image and provides a non-confrontational avenue for international interaction.

Keywords: public Diplomacy, North Korea, *Pyongyang Marathon*, *Soft Power*, *International Image*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional modern, diplomasi tidak lagi terbatas pada pertemuan antar elit negara. Pendekatan non-tradisional seperti diplomasi publik dan soft power telah menjadi sarana penting dalam membentuk citra dan pengaruh suatu negara. Dalam konteks demikian, negara mengembangkan strategi alternatif untuk mempertahankan legitimasi rezim dan membentuk citra positif di mata dunia. Salah satu instrumen yang menjadi penting dalam kerangka tersebut adalah *soft power*: kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik (*attraction*) daripada paksaan (*coercion*) atau pembayaran (*payment*) (Nye 2004). Salah satu bentuk soft power yang semakin diandalkan adalah diplomasi olahraga, yaitu penggunaan event atau aktivitas olahraga untuk memperkuat komunikasi internasional, membangun kepercayaan, dan menyampaikan pesan politik secara tidak langsung.

Dalam konteks ini, olahraga menjadi sarana yang dianggap netral namun sangat strategis. Melalui penyelenggaraan event olahraga internasional, negara dapat menyampaikan pesan, memperlihatkan nilai budaya, serta menunjukkan keterbukaan dan kedamaian kepada dunia luar. Korea Utara, sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia, memberikan studi kasus menarik tentang bagaimana negara otoriter dapat menggunakan jalur informal untuk mengomunikasikan citra alternatif di tengah tekanan global.

Dalam situasi politik yang dibatasi sanksi, isolasi diplomatik, dan citra internasional yang sangat negatif akibat isu hak asasi manusia serta program nuklir, Korea Utara tetap berusaha mempertahankan legitimasi global di tengah keterisolasian politik dan ekonomi. Negara ini terus berupaya membangun relasi dengan masyarakat internasional melalui jalur-jalur non-tradisional. Salah satu instrumen yang menonjol dalam konteks tersebut adalah diplomasi publik, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pyongyang Marathon atau Mangyongdae Prize International Marathon sebagai sarana komunikasi simbolik antara Korea Utara dan komunitas global.

Sebelum era terbukanya lomba maraton internasional di Pyongyang, Korea Utara telah memiliki tradisi menggunakan pertunjukan budaya dan olahraga sebagai sarana legitimasi dan diplomasi publik. Misalnya, pertunjukan massal seperti Arirang Mass Games menampilkan ribuan peserta dengan koreografi seragam dan latar pesan nasional-ideologis, yang sering dihadiri oleh delegasi asing sebagai bentuk “etalase” budaya dan disiplin sosial (Town 2019). Selain itu, olahraga-internasional dan event turisme olahraga juga mulai digunakan sebagai medium komunikasi non-konfrontatif di kancah global.

Pyongyang *Marathon* pertama kali diadakan pada tahun 1981 untuk memperingati ulang tahun pendiri negara, Kim Il-sung. *Event* ini diselenggarakan setiap bulan April, dan menjadi bagian dari kampanye pariwisata terbatas Korea Utara. Awalnya, maraton ini hanya diikuti oleh pelari domestik dan peserta dari negara-negara sahabat. Namun sejak tahun 2014, pemerintah Korea Utara secara resmi membuka partisipasi untuk pelari asing sebagai bagian dari kampanye pembukaan terbatas terhadap dunia luar. Sejak saat itu, terjadi peningkatan

partisipasi signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, hanya sekitar 200 pelari asing yang berpartisipasi. Jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 1.000 peserta dari lebih dari 60 negara pada 2017. Puncaknya terjadi pada 2018, di mana *event* ini menarik lebih dari 1.500 pelari asing, termasuk wisatawan dari negara-negara yang secara historis memiliki hubungan buruk dengan Korea Utara, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Tren partisipasi yang meningkat ini menunjukkan bahwa Pyongyang Marathon memiliki daya tarik tersendiri, baik sebagai pengalaman wisata unik maupun sebagai medium interaksi terbatas dengan masyarakat Korea Utara. Dalam praktiknya, setiap pelari asing yang mendaftar harus melalui agen wisata resmi yang bekerja sama dengan pemerintah, mengikuti tur yang telah disusun, dan terlibat dalam narasi media domestik yang menggambarkan keberhasilan dan keramahan Korea Utara. Melalui maraton ini, pemerintah Korea Utara berusaha memanfaatkan olahraga sebagai simbol keterbukaan dan modernitas, sekaligus membingkai pengalaman wisatawan asing sebagai bentuk pengakuan tidak langsung terhadap legitimasi negara.

Dalam banyak publikasi resmi, Pyongyang Marathon digambarkan sebagai bukti bahwa Korea Utara tidak seburuk yang digambarkan media Barat. Bahkan, beberapa peserta asing yang diwawancarai media internasional mengaku terkesan dengan kebersihan kota, pengaturan event, dan keramahan masyarakat lokal walaupun dalam konteks yang sangat terkontrol.

Melalui event ini, pemerintah Korea Utara mencoba mengonstruksi narasi bahwa negaranya aman, stabil, dan terbuka terhadap pertukaran budaya internasional. Keputusan ini menandai momen penting dalam sejarah hubungan luar negeri Korea Utara, karena melalui event tersebut, untuk pertama kalinya masyarakat internasional bisa mengikuti kegiatan publik di Pyongyang secara resmi.

Marathon ini menjadi satu dari sedikit kesempatan di mana warga asing diizinkan masuk ke wilayah Korea Utara dan berinteraksi dengan masyarakat lokal dalam ruang yang dikurasi dan dikontrol negara. Keikutsertaan pelari dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan negara-negara Eropa, memberikan ruang bagi Korea Utara untuk memproyeksikan citra yang lebih bersahabat, terbuka, dan normal di mata dunia. Bagi Korea Utara, event ini menjadi panggung strategis untuk menampilkan sisi humanis dan damai dari negara yang selama ini identik dengan narasi militeristik dan tertutup. Melalui penyelenggaraan maraton, rezim Korea Utara berusaha membentuk persepsi bahwa negara mereka adalah tempat yang aman, terorganisir, bahkan ramah terhadap pengunjung internasional.

Berdasarkan data dari *Koryo Tours* (2023) dan laporan independen NK News (2019), jumlah peserta asing dalam Pyongyang *Marathon* menunjukkan tren peningkatan signifikan sejak dibukanya akses internasional pada tahun 2014. Pada tahun pertama pembukaan, tercatat sekitar 200 pelari asing dari lebih dari 20 negara ikut serta dalam ajang ini. Angka tersebut meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2016, dengan lebih dari 600 peserta internasional, termasuk atlet amatir dari Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Puncak partisipasi terjadi pada tahun 2019,

sebelum pandemi COVID-19, ketika jumlah peserta asing mencapai sekitar 1.000 orang, mencatatkan rekor tertinggi sejak penyelenggaraan awalnya pada 1981. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan promosi *event* melalui jaringan pariwisata global seperti *Koryo Tours* dan *Young Pioneer Tours*, tetapi juga menunjukkan efektivitas diplomasi olahraga Korea Utara dalam menarik perhatian internasional. Selain itu, penyelenggaraan *Pyongyang Marathon* diperkirakan memberikan pemasukan devisa sebesar US\$1–1,5 juta per tahun melalui biaya pendaftaran, akomodasi, dan paket wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah. Data ini mengindikasikan bahwa ajang olahraga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat *soft power* dan pencitraan diplomatik, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi strategis di tengah isolasi global Korea Utara.

Ajang ini menjadi satu dari sedikit kegiatan yang memperbolehkan kehadiran warga asing di Pyongyang. Secara aspek, Korea Utara masih memanfaatkan *soft power* (Nye 2004). *Soft power* adalah kemampuan untuk memengaruhi aktor lain melalui daya tarik nilai budaya dan kebijakan alih-alih kekuatan militer atau ekonomi. Dalam praktik hubungan internasional modern, diplomasi olahraga telah digunakan oleh berbagai negara untuk meningkatkan reputasi internasional, menjalin hubungan informal, serta memperluas pengaruh budaya (Murray 2011), olahraga berpotensi menjadi instrumen diplomasi karena sifatnya yang netral, universal dan mampu menumbuhkan solidaritas antar bangsa.

Ajang olahraga internasional bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan citra negara, khususnya bagi negara-negara yang ingin memperbaiki citra negatifnya. *Pyongyang Marathon* tidak sekadar olahraga, tetapi bagian dari upaya komunikasi politik Korea Utara yang bertujuan membentuk narasi

perdamaian dan menjadi manifestasi dari upaya Korea Utara untuk membentuk narasi alternatif tentang negaranya, yaitu sebagai negara yang menjunjung semangat sportivitas dan kebersamaan, terlepas dari keterbatasan akses informasi dan kontrol domestik yang ketat. Korea Utara melakukan upaya diplomasi olahraga melalui Pyongyang *Marathon* atau Mangyongdae *Prize International Marathon*.

Sejak saat itu, *event* ini menjadi salah satu dari sedikit kesempatan di mana warga negara asing bisa mengunjungi Pyongyang secara legal dan mengikuti aktivitas publik diruang terbuka, Maraton Pyongyang menawarkan pengalaman unik bagi pelari asing karena mereka bisa berlari di kota yang biasanya tidak terbuka untuk pariwisata umum. Lintasan maraton membawa pelari melewati tempat - tempat penting di Pyongyang, seperti Stadion Kim Il Sung, tempat di mana upacara pembukaan dan penutupan maraton diselenggarakan. Bukan hanya tentang maraton, *event* ini juga melibatkan aspek pariwisata dan pertukaran budaya.

Peserta internasional biasanya mendaftar melalui agen perjalanan luar negeri yang telah bekerja sama dengan pemerintah Korea Utara. Mereka mengikuti paket wisata yang mencakup kunjungan ke situs bersejarah, museum, serta tempat-tempat simbolik seperti monumen pemimpin Korea Utara. Selama kunjungan, peserta berada dalam pengawasan ketat, tetapi tetap memiliki pengalaman langsung yang dapat membentuk opini pribadi mereka tentang negara tersebut. Dengan cara ini, Korea Utara mencoba menyampaikan citra negara yang stabil, aman, dan berbeda dari yang sering digambarkan media barat.

Namun demikian, efektivitas strategi ini tidak dapat dilepaskan dari kritik dan kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa partisipasi dalam Pyongyang *Marathon* secara tidak langsung mendukung legitimasi pemerintah yang memiliki rekam jejak

pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pengalaman wisatawan asing hanya menggambarkan "kulit luar" Korea Utara, bukan realitas kehidupan mayoritas rakyatnya. Kendati demikian, fakta bahwa *event* ini tetap menarik perhatian media internasional dan pelari profesional menunjukkan bahwa maraton tersebut berhasil menciptakan ruang dialog yang sebelumnya hampir tidak ada antara Korea Utara dan dunia luar. Dalam kurun waktu 2014–2025,

Pyongyang *Marathon* mengalami berbagai dinamika. *Event* ini sempat mengalami pembatalan selama tiga tahun berturut-turut akibat pandemi COVID-19. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada periode 2020 hingga 2022. Meskipun demikian, pemerintah Korea Utara telah menyatakan niat untuk membuka kembali maraton bagi peserta asing setelah situasi pandemi mereda. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa Pyongyang *Marathon* adalah salah satu alat penting dalam diplomasi publik Korea Utara, dan bukan sekadar kegiatan olahraga biasa. Korea Utara menggunakan *event* ini secara strategis untuk mempertahankan relevansi internasionalnya di tengah tekanan politik dan ekonomi global. Fenomena ini menarik untuk dianalisis dalam kerangka hubungan internasional karena menunjukkan dinamika penggunaan *soft power* oleh negara-negara dengan keterbatasan akses diplomatik formal. Penelitian ini penting karena belum banyak kajian akademik yang secara mendalam mengamati Pyongyang *Marathon* sebagai alat diplomasi publik. Sebagian besar literatur tentang Korea Utara fokus pada isu-isu keamanan, nuklir dan HAM.

Dengan menempatkan maraton dalam perspektif hubungan internasional, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman baru tentang bagaimana negara yang sangat tertutup seperti Korea Utara berupaya menjalankan diplomasi publik melalui jalur yang tidak konvensional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya olahraga sebagai alat komunikasi politik dalam konteks global yang semakin kompleks. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini akan mengeksplorasi bagaimana Pyongyang *Marathon* dijadikan sebagai bentuk diplomasi olahraga oleh pemerintah Korea Utara selama periode 2010 hingga 2025, serta sejauh mana strategi ini berhasil dalam membentuk persepsi global terhadap negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pyongyang *Marathon* digunakan sebagai instrumen diplomasi publik oleh Korea Utara dalam membangun citra internasional pada tahun 2014 - 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pyongyang *Marathon* dimanfaatkan oleh pemerintah Korea Utara sebagai instrumen diplomasi publik dalam rangka membangun citra internasional yang lebih positif selama periode 2014 hingga 2025. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana Pyongyang Marathon digunakan sebagai instrument diplomasi public oleh Korea Utara dalam upaya membangun citra positif negara di mata masyarakat internasional melalui pendekatan soft power. Serta evaluasi efektivitas *event* ini sebagai bagian dari diplomasi publik Korea Utara.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan *Pyongyang Marathon* sebagai instrumen diplomasi publik Korea Utara selama periode 2014–2019, sejak dibuka untuk pelari asing. Rentang waktu tersebut dipilih karena tersedia data dan dokumentasi memadai tentang partisipasi internasional dan strategi promosi pemerintah. Penelitian ini meneliti bagaimana *Pyongyang Marathon* dirancang dan dipromosikan untuk membangun citra keterbukaan dan perdamaian Korea Utara. Analisis difokuskan pada peran aktor negara dan non-negara dalam praktik diplomasi publik tersebut, serta menilai kontribusinya terhadap pembentukan citra positif Korea Utara di tengah tekanan politik dan sanksi internasional, tanpa membahas aspek teknis atau dampak ekonomi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berfungsi untuk menelaah berbagai kajian terdahulu yang relevan dengan tema diplomasi publik melalui olahraga, pemanfaatan event ini olahraga sebagai alat pencitraan negara, serta studi khusus tentang Korea Utara dan *Pyongyang Marathon*. Kajian ini membangun pemahaman teoritis yang mendukung argumen bahwa *Pyongyang Marathon* bukan sekadar kegiatan olahraga, melainkan bagian dari strategi diplomasi publik Korea Utara.

Kajian pertama yang penting dalam mendasari penelitian ini adalah literatur tentang diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga adalah praktik penggunaan olahraga untuk mencapai tujuan diplomatik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Trunkos, Judit, and Heere 2017). Dalam kerangka ini, olahraga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk membangun hubungan antarnegara, memperkuat citra negara, hingga menjadi saluran komunikasi politik yang non-

konfrontatif. Mereka membagi diplomasi olahraga ke dalam dua bentuk utama: *diplomacy through sport* (olahraga sebagai sarana diplomasi) dan *diplomacy by sport* (negara menggunakan olahraga secara strategis sebagai alat komunikasi dan pencitraan). Korea Utara secara sadar menggunakan Pyongyang *Marathon* untuk membentuk narasi internasional yang sesuai dengan kepentingan politik luar negerinya.

Selanjutnya, melalui jurnal mereka *Sports Mega - Events as Part of a Nation's Soft Power Strategy* memberikan pemahaman lebih luas mengenai hubungan antara diplomasi olahraga dan pembangunan citra negara (*nation branding*) (Grix and Houlihan 2014). Dalam penelitian tersebut, mereka menganalisis bagaimana Jerman dan Inggris menggunakan *event* olahraga berskala internasional, seperti Piala Dunia dan Olimpiade, untuk menunjukkan identitas nasional, stabilitas politik, dan keterbukaan terhadap dunia. Walaupun konteks Korea Utara sangat berbeda, terutama karena keterbatasan akses dan dominasi narasi tunggal oleh negara, prinsip dasarnya tetap serupa: olahraga digunakan sebagai alat komunikasi simbolik untuk mempengaruhi opini global. Pyongyang *Marathon*, meskipun skalanya tidak sebesar Olimpiade, tetap mengandung dimensi simbolik yang kuat karena merupakan satu dari sedikit aktivitas terbuka yang mempertemukan warga Korea Utara dan asing dalam satu ruang.

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan dalam konteks studi empiris, penelitian secara khusus membahas strategi Korea Utara dalam menggunakan Pyongyang *Marathon* sebagai bagian dari diplomasi simbolik (Cathcart 2015). Ia menunjukkan bahwa *event* ini tidak hanya menarik pelari dari berbagai negara, tetapi juga dirancang untuk menampilkan citra kota Pyongyang yang terorganisir

dan monumental. Rute lari yang melewati simbol nasionalisme seperti *Juche Tower*, Kim Il-sung Stadium, dan *Arch of Triumph* menjadi bagian dari narasi visual yang ingin ditanamkan oleh negara kepada peserta asing. Kajian Cathcart ini sangat relevan karena menggambarkan praktik *nation image repair* melalui simbol olahraga.

Dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik merupakan sarana strategis yang semakin penting dalam praktik hubungan internasional. Negara-negara, baik yang terbuka maupun tertutup, memanfaatkan olahraga sebagai medium untuk menyampaikan pesan politik secara tidak langsung dan membentuk persepsi global yang diinginkan. Namun, hingga saat ini, masih sedikit kajian yang secara spesifik membahas diplomasi publik oleh negara otoriter dan tertutup seperti Korea Utara. Sebagian besar studi masih terfokus pada negara demokratis yang memiliki akses luas ke media dan partisipasi publik global. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti bagaimana Korea Utara, melalui Pyongyang *Marathon*, menjalankan bentuk diplomasi olahraga yang unik dan terkendali sebagai bagian dari strategi *soft power* dalam periode 2014 hingga 2025.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Korea Utara memanfaatkan Pyongyang *Marathon* sebagai instrumen diplomasi publik dalam upaya membentuk citra internasionalnya pada periode 2014–2025. Guna menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini berlandaskan pada teori *soft power* yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye. Nye memperkenalkan konsep *soft power* sebagai bentuk kekuatan non-koersif yang digunakan negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik (*attraction*) dan legitimasi moral, bukan melalui paksaan (*coercion*) atau imbalan material (*payment*) (Nye 2004, 5).

Menurutnya, *soft power* timbul ketika negara memiliki kemampuan untuk membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai politik, serta kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan bermoral oleh komunitas internasional (Nye 2004, 9). Nye menegaskan bahwa kekuatan lunak tidak terletak pada kemampuan militer atau ekonomi, melainkan pada kemampuan menciptakan citra positif dan kepercayaan yang membuat negara lain secara sukarela mengadopsi nilai atau pandangan yang diinginkan. Pengaruh yang dihasilkan bukan karena paksaan, tetapi karena kekaguman dan keinginan untuk meniru.

Nye (2004, 11) mengklasifikasikan tiga sumber utama dari *soft power* yakni (1) budaya, yakni ketika unsur budaya suatu negara mampu menimbulkan daya tarik universal; (2) nilai-nilai politik, ketika sistem politik dan perilaku pemerintah dipandang kredibel dan mencerminkan legitimasi moral; serta (3) kebijakan luar negeri, ketika kebijakan suatu negara dinilai sah, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Ia menjelaskan bahwa negara dengan budaya yang menarik, nilai-nilai yang konsisten dengan moralitas universal, serta kebijakan luar negeri yang

konstruktif akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam sistem internasional tanpa menggunakan kekuatan koersif. *Soft power* menjadi bentuk kekuatan yang bersumber dari kemampuan membangun citra positif dan kepercayaan internasional melalui daya tarik yang otentik.

Pada teori Nye, *public diplomacy* atau diplomasi publik merupakan salah satu instrumen utama *soft power*. Nye menulis bahwa “*public diplomacy deals with the communication of values and culture to foreign publics in ways that enhance a country's soft power*” (Nye 2004, 107). Artinya, diplomasi publik berfungsi sebagai saluran strategis bagi negara untuk mengomunikasikan nilai, budaya, dan kebijakan luar negeri secara langsung kepada masyarakat internasional, bukan hanya kepada pemerintah lain. Nye menegaskan bahwa efektivitas diplomasi publik terletak pada kemampuan menciptakan *credibility* dan *trust*, karena “*credibility is the scarcest resource in public diplomacy*” (Nye 2004, 107). Diplomasi publik tidak hanya sekadar promosi politik, melainkan upaya jangka panjang membangun citra yang menarik dan terpercaya di mata dunia.

Nye (2004, 108) juga menekankan bahwa *soft power* bekerja secara paling efektif melalui pengalaman emosional dan simbolik yang menghasilkan persepsi positif tentang suatu negara. Pengaruh ini bersifat tidak langsung, menyebar melalui narasi, interaksi sosial, dan persepsi publik luar terhadap daya tarik budaya maupun nilai politik suatu negara. Oleh karena itu, diplomasi publik menjadi jembatan penting antara sumber *soft power* (budaya, nilai, dan kebijakan luar negeri) dengan penerima pesan di masyarakat global. Nye menutup gagasannya dengan menegaskan bahwa di era globalisasi, keberhasilan diplomasi modern bergantung bukan pada kemampuan memaksa, melainkan pada kemampuan menarik dan meyakinkan (*the ability to attract rather than coerce*) (Nye 2004, 15).

Kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa Pyongyang Marathon bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi sebuah instrumen strategis soft power yang digunakan Korea Utara untuk memperluas pengaruh, memperbaiki citra, dan memperoleh pengakuan internasional melalui pendekatan diplomasi publik yang bersandar pada konsep daya tarik, legitimasi moral, dan kebijakan luar negeri yang bersifat persuasif sebagaimana dirumuskan oleh Joseph S. Nye.

1.7 Argumen Sementara

Penyelenggaraan Pyongyang Marathon tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi publik yang digunakan Korea Utara untuk membentuk citra internasionalnya. Dengan mengatur rute maraton yang menonjolkan landmark nasional dan menghadirkan interaksi terbatas namun terkontrol dengan warga lokal, negara berupaya menunjukkan stabilitas dan keterbukaan yang terkelola. Selain itu, kehadiran peserta asing membawa dampak ekonomi melalui pembelian paket wisata resmi, serta menghasilkan testimoni pengalaman yang kemudian berperan dalam menciptakan narasi tandingan terhadap citra negatif Korea Utara di media internasional. Dengan demikian, Pyongyang Marathon memiliki nilai strategis baik dalam ranah diplomasi simbolik maupun penguatan citra negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji Pyongyang *Marathon* sebagai bentuk diplomasi

publik yang dilakukan Korea Utara pada periode 2014–2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis mengeksplorasi secara mendalam berbagai aspek sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi penyelenggaraan acara ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pyongyang *Marathon* sebagai ajang olahraga internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea Utara. Fokus objek penelitian terletak pada penggunaan *event* tersebut sebagai alat diplomasi publik dan media komunikasi politik dalam konteks hubungan internasional. Penelitian menelaah bagaimana Pyongyang *Marathon* diposisikan sebagai bagian dari strategi diplomasi publik Korea Utara selama periode 2014 hingga 2025, serta bagaimana *event* ini digunakan untuk membentuk citra negara di mata komunitas global. Subjek penelitian terdiri dari aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan dan narasi Pyongyang *Marathon*. Mereka meliputi pemerintah Korea Utara sebagai penyelenggara utama, agen wisata internasional yang bekerja sama dalam promosi dan pendaftaran peserta asing, media internasional yang meliput *event* tersebut, serta para pelari asing yang Mengikuti maraton sebagai partisipan dan saksi dari diplomasi informal yang berlangsung.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah, buku, laporan media internasional, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga yang

fokus pada isu Korea Utara dan diplomasi olahraga. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis.

1.8.4 Proses Penelitian

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode *content analysis* guna mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan strategi diplomasi olahraga Korea Utara, simbolisme yang terkandung dalam *event* tersebut, serta dampak Pyongyang *Marathon* terhadap citra negara. Metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana acara olahraga tersebut digunakan sebagai alat diplomasi publik dan penerapan *soft power*. Dengan menggunakan pendekatan dan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual mengenai peran Pyongyang *Marathon* dalam strategi diplomasi Korea Utara, khususnya dalam menghadapi tantangan politik dan isolasi internasional selama rentang waktu yang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk menunjukkan alur analisis yang konsisten dan sesuai dengan kerangka diplomasi publik sebagaimana dijelaskan oleh Nye, yang menekankan peran *event* olahraga dalam membangun relasi internasional, menyebarkan informasi, dan memfasilitasi pertukaran budaya (Nye 2004). Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran, cakupan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan konteks teoretis dan empiris, dimulai dari *soft power* Korea Utara, praktik diplomasi publik, Pyongyang *Marathon* sebagai sarana diplomasi, hingga strategi pencitraan Korea Utara melalui *event* tersebut.

Bab III mengkaji Pyongyang *Marathon* dalam kerangka diplomasi publik, mencakup marathon sebagai Representasi *Soft Power* Budaya Korea Utara, Pyongyang marathon dan internalization of political values Korea Utara,Pyongyang marathon dalam kerangka kebijakan luar negeri Korea.

Bab IV Penutup menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sekaligus rekomendasi bagi pengembangan studi diplomasi publik, khususnya dalam konteks negara yang mengalami isolasi diplomatik seperti Korea Utara.

BAB 2

PYONGYANG *MARATHON* & DIPLOMASI PUBLIK KOREA UTARA

2.1 Soft power Korea Utara

Konsep *soft power* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye sebagai kekuatan yang memungkinkan suatu negara memengaruhi pihak lain tanpa menggunakan tekanan militer atau ekonomi, melainkan melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah (Nye 2004). *Soft power* muncul sebagai pelengkap dari *hard power* yang bersifat koersif dan lebih mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, *soft power* dianggap sebagai instrumen penting dalam membentuk persepsi, mendapatkan simpati, dan memperluas pengaruh suatu negara tanpa konflik langsung (Giulianotti and Robertson 2019).

Bagi negara-negara dengan keterbatasan politik atau ekonomi, *soft power* menjadi jalur alternatif yang strategis. Hal ini sangat relevan bagi Korea Utara, sebuah negara yang secara historis mengalami keterasingan diplomatik, embargo ekonomi, dan reputasi buruk dalam hal hak asasi manusia. Korea Utara menghadapi tantangan besar dalam membentuk citra internasional yang positif karena sistem politiknya yang otoriter, serta narasi global yang didominasi oleh media Barat (Murray 2011). Dalam kondisi seperti itu, penggunaan *soft power* menjadi instrumen penting yang memungkinkan Korea Utara berinteraksi dengan dunia luar, meskipun dalam ruang gerak yang sangat terbatas.

Korea Utara memiliki beberapa alasan strategis untuk mengembangkan kebijakan *soft power*. Pertama, negara ini berada dalam posisi geopolitik yang sensitif dan selalu diawasi ketat oleh kekuatan regional dan global, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Perserikatan Bangsa - Bangsa. Sementara tekanan sanksi dan sosial diplomatik terus berlangsung, *soft power* memungkinkan Korea Utara untuk mempertahankan eksistensinya dalam arena global tanpa konfrontasi langsung. Kedua, melalui *soft power*, Korea Utara dapat membangun narasi alternatif terhadap citra negatif yang dibentuk media internasional. Kedua, melalui *soft power*. Negara ini berupaya menampilkan dirinya sebagai negara yang aman, stabil, mandiri, dan kaya budaya, sekaligus menutupi sisi represifnya (Murray 2011).

Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah Pyongyang Marathon, atau *Mangyongdae Prize International Marathon*. Lomba ini awalnya bersifat domestik ketika pertama kali digelar pada 1981 untuk memperingati hari kelahiran Kim Il-sung, tetapi sejak 2014 dibuka untuk pelari amatir asing sebagai bagian dari upaya menampilkan keterbukaan terbatas. Media internasional melaporkan bahwa sekitar 225 pelari dari 27 negara berpartisipasi pada edisi 2014, sebuah langkah yang menandai perubahan penting dalam cara Korea Utara menampilkan diri kepada dunia (Koreakonsult 2019). Melalui pembukaan tersebut, rezim berusaha mengirim pesan bahwa Pyongyang mampu menyelenggarakan acara internasional yang aman, terorganisir, dan disiplin, sekaligus memperkenalkan citra bangsa yang tertib kepada peserta asing.

Setahun kemudian, kebijakan tersebut sempat berubah ketika pemerintah melarang keikutsertaan pelari asing karena kekhawatiran akan penyebaran virus Ebola. Pembatasan ini, yang diberitakan luas oleh media internasional, menunjukkan bahwa keterbukaan Korea Utara tetap sangat terkendali dan bergantung pada kepentingan rezim terhadap keamanan nasional dan citra internasional (Bonner 2015). Meski demikian, penyelenggaraan kembali maraton untuk peserta asing pada tahun berikutnya menegaskan bahwa olahraga ini tetap menjadi alat diplomasi publik yang penting.

Dalam beberapa tahun selanjutnya, acara tersebut mengalami peningkatan pesat. Agen wisata seperti Koryo Tours dan Young Pioneer Tours mulai mempromosikan paket wisata maraton ke Pyongyang, dan jumlah peserta asing meningkat dari ratusan hingga hampir seribu orang menjelang 2019 (Koryo Group 2019). Rute perlombaan yang melintasi monumen ikonik seperti Kim Il-sung Stadium, Arch of Triumph, dan Kim Il-sung Square menjadikan ajang ini pertunjukan visual yang menonjolkan kedisiplinan, keseragaman, dan semangat kolektivisme rakyat Korea Utara. Setiap detailnya dikoreografikan untuk memancarkan kesan keteraturan dan kebanggaan nasional. Dalam kerangka teori Nye (2011, 94), tindakan semacam ini menunjukkan bagaimana *soft power* dapat bekerja melalui simbol budaya dan perilaku politik yang dikagumi.

Keberhasilan acara mencapai puncaknya pada 2019 ketika hampir 1.000 pelari asing ikut serta dan media global melaporkan Pyongyang sebagai “tuan rumah kompetisi yang tertib dan aman” (Press 2014). Citra positif ini memberi Korea Utara ruang untuk memperkenalkan aspek non-militer dari negaranya, memperluas daya tarik budaya, dan memosisikan olahraga sebagai sarana komunikasi politik

non-konfrontatif. Namun, momentum ini berhenti mendadak ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai 2020 hingga 2024, maraton dibatalkan berulang kali karena kebijakan penutupan perbatasan. NK News (2024) melaporkan bahwa pembatalan selama lima tahun berturut-turut menandai berakhirnya satu-satunya ajang besar yang sebelumnya mengundang warga asing secara teratur. Vakumnya acara ini memperlihatkan betapa rapuhnya strategi *soft power* yang bergantung pada kontak langsung dengan dunia luar.

Setelah jeda panjang, pada 6 April 2025, Pyongyang Marathon kembali digelar dan menjadi acara internasional pertama yang diadakan Korea Utara sejak pandemi. Sekitar 200 pelari amatir asing dari lebih 40 negara hadir melalui tur resmi, sementara ribuan penonton memenuhi Kim Il-sung Stadium untuk menyambut mereka (Reuters 2025; DW 2025). Liputan media menggambarkan acara ini sebagai “sinyal keterbukaan kembali” Korea Utara setelah hampir enam tahun isolasi penuh. Meskipun jumlah peserta asing jauh lebih sedikit dibanding 2019, penyelenggaraan ini memiliki makna politik yang besar rezim menggunakan olahraga untuk menunjukkan stabilitas domestik dan kesiapan berinteraksi kembali dengan dunia, tetapi tetap dalam pengawasan penuh negara.

Melalui perkembangan tersebut, Pyongyang Marathon mencerminkan tiga aspek utama *soft power* Korea Utara. Dari sisi budaya, ajang ini berfungsi sebagai pertunjukan kedisiplinan dan kebersamaan rakyat, yang sejalan dengan ideologi *Juche* dan nilai kolektivisme. Dari aspek politik, keberhasilan penyelenggaraan dan pemberitaan positifnya dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi rezim Kim Jong-un di mata publik domestik maupun internasional. Dari dimensi kebijakan luar negeri, kolaborasi dengan agen wisata asing dan partisipasi pelari internasional

membuka jalur diplomasi publik yang relatif aman sebuah “pembukaan terkendali” yang memungkinkan interaksi lintas negara tanpa mengancam stabilitas politik internal.

Walau efektivitasnya terbatas oleh kontrol informasi dan akses yang ketat, Pyongyang Marathon tetap menjadi instrumen penting dalam strategi *soft power* Korea Utara. Acara ini menegaskan bahwa bahkan dalam kondisi isolasi politik, negara dapat menggunakan olahraga untuk mengomunikasikan nilai-nilai budaya, meneguhkan legitimasi ideologis, dan mengirim pesan simbolik tentang keterbukaan dan kemandirian kepada masyarakat internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *soft power* bagi Korea Utara bukanlah sekadar simbol atau teori, melainkan strategi diplomasi alternatif yang dijalankan secara sistematis dalam berbagai bentuk. Melalui perpaduan budaya nasional, promosi nilai-nilai ideologis, dan aktivitas internasional yang dikendalikan, Korea Utara berusaha membangun ruang diplomasi yang tidak konfrontatif. Dalam hal ini, Pyongyang *Marathon* menjadi studi kasus ideal untuk melihat bagaimana diplomasi olahraga dijalankan sebagai bagian dari kebijakan *soft power* negara tertutup di era global.

2.2 Diplomasi Publik Korea Utara

Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun citra suatu negara di mata masyarakat internasional melalui penyampaian nilai, budaya, serta pesan politik yang bersifat persuasif dan tidak memaksa. Nye (2004, 83) menjelaskan bahwa diplomasi publik adalah bagian dari penerapan *soft power*, yaitu kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, bukan melalui tekanan militer atau ekonomi. Melalui diplomasi publik, negara berupaya membentuk persepsi positif dan meningkatkan legitimasi di hadapan publik global.

Joseph Nye (2004, 4) menyatakan bahwa diplomasi publik merupakan salah satu instrumen utama dari *soft power*, yaitu kemampuan suatu negara untuk “menarik” pihak lain, bukan memaksa atau membeli dukungan. *Soft power* bekerja melalui tiga sumber utama: budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Ketiga unsur tersebut dapat menjadi sumber daya yang menciptakan citra positif apabila dianggap menarik, kredibel, dan konsisten. Dalam hal ini, diplomasi publik menjadi saluran penyampai nilai-nilai tersebut kepada masyarakat internasional.

Dalam konteks Korea Utara, diplomasi publik memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan negara-negara lain. Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat tertutup secara politik dan informasi, memiliki hubungan diplomatik terbatas, serta sering menjadi sorotan internasional terkait isu nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia. Citra yang terbentuk di mata dunia internasional sebagian besar bersifat negatif, sehingga negara tersebut memiliki kebutuhan strategis untuk mengambil langkah-langkah komunikasi eksternal yang dapat memperbaiki atau mengimbangi citra tersebut (Nye 2004, 8).

Karena itu, Korea Utara mengembangkan bentuk diplomasi publik yang bersifat selektif, yaitu dengan hanya membuka sebagian ruang interaksi dengan dunia luar yang dapat dikontrol oleh negara. Salah satu bentuk diplomasi publik yang dilakukan adalah melalui kegiatan yang menonjolkan budaya nasional, kesenian, pariwisata, dan olahraga. Kegiatan seperti pertunjukan massal (*Mass Games*), festival budaya, konser musik, hingga penyelenggaraan Pyongyang Marathon merupakan sarana untuk memperlihatkan wajah negara yang “normal,” harmonis, damai, dan memiliki identitas budaya yang unik.

Diplomasi publik Korea Utara pada dasarnya diarahkan untuk mengonstruksi citra alternatif yang berbeda dari representasi negatif dalam media Barat. Negara ini berupaya menunjukkan bahwa masyarakatnya hidup dalam keteraturan, bahwa negara mampu menyelenggarakan kegiatan internasional, dan bahwa Korea Utara tidak sepenuhnya tertutup atau agresif, melainkan negara yang memiliki kapasitas berinteraksi dengan warga dunia. Melalui penyebaran narasi ini, Korea Utara berusaha menumbuhkan *soft power* yakni kekuatan daya tarik sehingga persepsi publik asing tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemberitaan politik yang bersifat antagonistik (Nye 2004, 89).

Dengan demikian, diplomasi publik dalam perspektif Korea Utara merupakan usaha sistematis dan terukur dalam membentuk citra negara melalui pengelolaan kontak budaya dan pertukaran sosial yang dapat diterima dan dipantau. Dalam kerangka teori Nye, diplomasi publik Korea Utara bukan hanya strategi komunikasi, tetapi merupakan upaya peningkatan legitimasi dan pembentukan identitas internasional yang lebih menguntungkan bagi negara tersebut.

2.3 Pyongyang *Marathon* Sebagai Instrumen Diplomasi Publik

Pyongyang Marathon, secara resmi dikenal sebagai *Mangyongdae Prize International Marathon*, pertama kali diselenggarakan pada tahun 1981 sebagai bagian dari perayaan kelahiran Kim Il-sung (World Athletics 2023). Adalah ajang tahunan yang diselenggarakan di Korea Utara sejak 1981, dan mengalami transformasi penting sejak dibuka bagi peserta internasional pada tahun 2014. Pyongyang *Marathon*, yang dikenal secara resmi sebagai *Mangyongdae Prize International Marathon*, merupakan salah satu ajang lari internasional yang paling unik di dunia karena diselenggarakan di tengah salah satu negara paling tertutup,

yaitu Korea Utara. Perlombaan ini pertama kali diadakan pada tahun 1981 sebagai bentuk perayaan kelahiran Kim Il-sung dan sempat hanya terbatas diikuti oleh pelari dalam negeri serta beberapa atlet undangan dari negara sahabat. Namun, sejak tahun 2014, *event* ini mulai dibuka untuk peserta umum dari berbagai negara, menjadikannya salah satu ruang terbuka yang langka di Korea Utara untuk interaksi warga internasional.

Awalnya, Pyongyang *Marathon* hanya merupakan kompetisi domestik yang diikuti oleh pelari-pelari Korea Utara dan beberapa negara sekutu sosialis seperti Cina, Vietnam, atau negara-negara dari blok Timur. Ajang ini menjadi simbol nasionalisme serta kebanggaan atas kemampuan atletik Korea Utara. Namun seiring waktu, pemerintah Korea Utara mulai menyadari potensi olahraga ini sebagai alat diplomasi dan pencitraan negara di ranah global.

Transformasi signifikan terjadi pada tahun 2014, ketika untuk pertama kalinya Pyongyang *Marathon* dibuka untuk peserta internasional dari negara-negara Barat dan berbagai kawasan lainnya. Langkah ini dilakukan dalam konteks

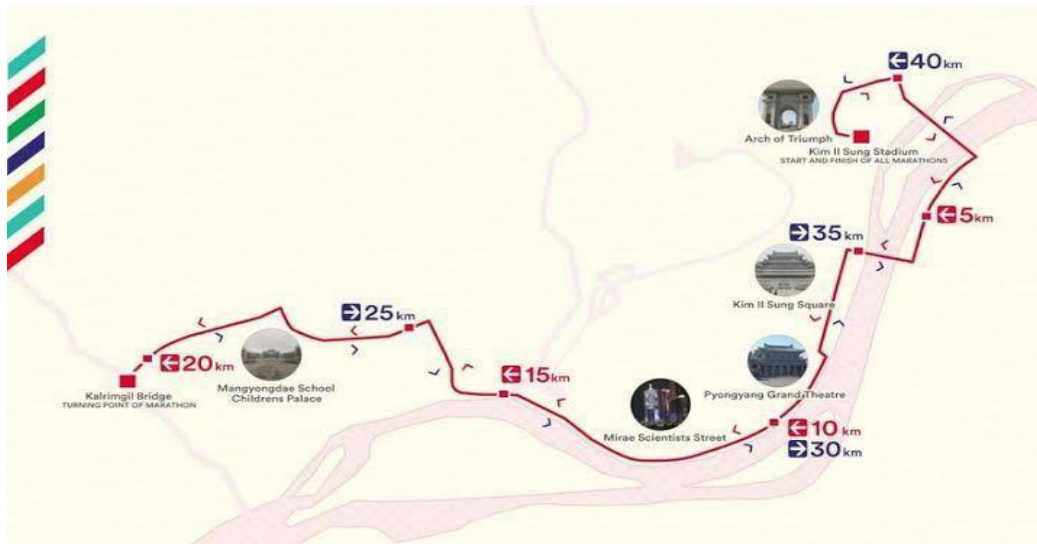
pencarian jalur diplomasi non-tradisional dan penguatan *soft power*. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam upaya Korea Utara membentuk citra positif di mata dunia internasional melalui pendekatan diplomasi publik. Diplomasi publik, atau *public diplomacy*, merujuk pada praktik pemanfaatan kegiatan olahraga oleh negara sebagai saluran untuk menjalin komunikasi politik, memperbaiki citra internasional, atau memperkuat hubungan antarnegara. Dalam konteks Korea Utara, Pyongyang *Marathon* dimanfaatkan untuk menunjukkan keterbukaan, stabilitas, serta keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan *event* global yang tertib dan aman.

Sejak tahun 2014, pemerintah Korea Utara melalui agen perjalanan seperti *Koryo Tours* membuka pendaftaran maraton ini kepada warga negara asing. Meskipun tetap berada dalam kontrol ketat, peserta asing diizinkan untuk berlari bersama warga lokal melintasi jalanan utama kota Pyongyang. Hal ini memberikan kesan bahwa Korea Utara adalah negara yang terbuka dan aman, jauh dari narasi media Barat yang menggambarkannya sebagai tertutup dan represif. Strategi ini menjadi salah satu bentuk implementasi dari kebijakan *soft power*, yaitu upaya membentuk persepsi dan pengaruh melalui budaya, nilai, dan simbol, tanpa menggunakan kekuatan militer atau ekonomi (Nye 2004, 9).

Selain menjadi ajang kompetisi, Pyongyang Marathon juga dirancang sebagai “panggung” visual yang menampilkan citra negara. Setiap tahunnya, rute maraton melewati landmark penting seperti Kim Il Sung Stadium, Arch of Triumph, Kim Il Sung Square, Pyongyang Grand Theatre, Mirae Scientists Street, dan Kaeson Youth Park. Landmark-landmark tersebut berfungsi sebagai simbol kejayaan nasional yang secara strategis dimasukkan dalam narasi diplomasi visual Korea Utara.

Dengan demikian, setiap sudut rute maraton diatur untuk memperlihatkan stabilitas sosial dan kesatuan nasional melalui representasi ruang kota yang monumental (Cathcart 2020; Koryo Tours 2023).

Gambar 1. Rute Resmi Pyongyang Marathon



Sumber: Koryo Tours, 2023

Desain rute maraton sendiri tidak hanya mempertimbangkan jarak tempuh, tetapi juga elemen simbolik. Rute melingkar yang berawal dan berakhir di Kim Il Sung Stadium menggambarkan sentralisasi ideologi dan pengaruh pemimpin nasional. Setiap *landmark* yang dilalui pelari merupakan bagian dari representasi nasionalisme Korea Utara. Ini menjadikan maraton bukan sekadar olahraga, melainkan ritual pencitraan.

Pyongyang Marathon tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan devisa bagi Korea Utara. Peserta asing wajib membeli paket perjalanan resmi yang mencakup akomodasi, transportasi lokal, pendamping wisata, dan izin masuk negara, karena tidak ada opsi perjalanan mandiri bagi turis luar negeri (Koryo Tours 2023). Kebijakan ini menjadikan ajang ini sebagai salah satu momen terbatas dimana warga asing diizinkan masuk secara

legal, terutama pada situasi di mana pariwisata internasional dibatasi secara ketat.

Selain memberikan pemasukan ekonomi, acara ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi simbolik melalui pengalaman langsung yang dibawa pulang oleh peserta (Cathcart 2020). Dalam beberapa blog perjalanan, peserta dari Inggris menggambarkan penyelenggaraan maraton sebagai “lebih profesional dan teratur daripada citra Korea Utara di media Barat”, serta menyebut bahwa interaksi dengan penduduk lokal meskipun terbatas tetap memberikan kesan positif mengenai kehidupan di Pyongyang (Koryo Tours Blog 2019).

Pelari lain, Drew Binsky, menyatakan bahwa Pyongyang “tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran media Barat” dan menyebut pengalamannya “menarik dan penuh kejutan” setelah berlari melewati berbagai landmark kota (Binsky 2024). Sementara itu, dalam laporan resmi Koryo Tours, Zoe Stephens menggambarkan momen memasuki Kim Il Sung Stadium sebagai “pengalaman paling mendekati atmosfir Olimpiade,” karena stadion dipenuhi penonton yang bersorak dalam koreografi massa yang dramatik (Stephens 2018). Dengan demikian, testimoni peserta berfungsi sebagai bentuk diplomasi publik tak langsung, yang pada akhirnya menciptakan narasi tandingan terhadap representasi media internasional yang selama ini menggambarkan Korea Utara secara eksklusif melalui ketertutupan dan represi.

Dengan demikian, Pyongyang *Marathon* menjadi contoh konkret dari diplomasi publik dalam bentuk yang paling khas. Korea Utara memanfaatkan olahraga sebagai alat lunak untuk menyampaikan pesan tersirat tentang kestabilan, keamanan, keterbukaan. Melalui penyelenggaraan yang konsisten dan narasi visual

yang dikendalikan, maraton ini telah menjadi bagian penting dari strategi diplomasi publik Korea Utara di tengah isolasi internasional.

2.4 Strategi Pencitraan Korea Utara Melalui Pyongyang Marathon

Dalam dunia hubungan internasional, pencitraan negara atau *nation branding* telah menjadi alat penting dalam membentuk persepsi global, terlebih bagi negara-negara yang mengalami keterbatasan dalam jalur diplomasi resmi. Korea Utara secara sistematis memanfaatkan *Pyongyang Marathon* sebagai instrumen pencitraan nasional untuk menampilkan citra positif kepada dunia internasional. Dalam kondisi global yang penuh tekanan terhadap Korea Utara akibat sanksi ekonomi, isu hak asasi manusia, dan isolasi diplomatik, *event* olahraga ini menjadi sarana alternatif untuk mengubah persepsi internasional tentang negara tersebut (Murray and Pigman 2014).

Korea Utara, sebagai negara yang selama puluhan tahun dikenal dengan politik isolasionis dan tertutup, telah mulai memanfaatkan strategi pencitraan non-tradisional sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Salah satu instrumen yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah *Pyongyang Marathon*. Ajang olahraga ini bukan hanya kompetisi atletik, tetapi juga telah berevolusi menjadi media visualisasi dan komunikasi strategis untuk membangun citra internasional Korea Utara sebagai negara yang stabil, damai, dan ramah terhadap komunitas global. Strategi ini dijalankan melalui narasi visual yang terkontrol, pemanfaatan simbolisme ruang publik, serta interaksi terbatas namun terkesan terbuka dengan peserta asing.

Kehadiran Pyongyang *Marathon* di panggung global sejak dibuka untuk peserta asing pada tahun 2014 menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Korea Utara terhadap diplomasi. Pemerintah tidak lagi semata-mata mengandalkan hubungan antarnegara formal, melainkan juga menyasar opini publik internasional melalui *public diplomacy* yaitu diplomasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat luar negeri. Strategi ini sangat sejalan dengan konsep *soft power* sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Nye, yakni kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan yang disukai, bukan melalui paksaan atau tekanan ekonomi dan militer (Nye 2004).

Melalui Pyongyang *Marathon*, Korea Utara mencoba membangun narasi alternatif dari citra negatif yang selama ini melekat, yaitu negara otoriter, tertutup, dan represif. Citra yang ingin dikonstruksi adalah negara yang mampu menyelenggarakan *event* internasional, aman untuk dikunjungi, memiliki masyarakat yang tertib dan ramah, serta infrastruktur kota yang modern. *Marathon* ini dipromosikan melalui kerja sama dengan agen wisata internasional seperti *Koryo Tours* dan *Young Pioneer Tours*, serta media lokal seperti KCNA, yang menyajikan dokumentasi positif kepada dunia luar.

Strategi pencitraan ini dikemas melalui pengalaman wisata yang dikurasi, mulai dari penyambutan peserta asing, kunjungan ke situs budaya dan politik, hingga liputan media lokal yang menggarisbawahi antusiasme warga terhadap *event* tersebut. Pemerintah memastikan bahwa interaksi yang terjadi selama maraton tetap dalam kontrol narasi negara, sehingga hanya sisi positif Korea Utara yang ditampilkan kepada dunia luar. Salah satu elemen utama dari strategi pencitraan ini adalah pemanfaatan narasi visual.

Seluruh kegiatan Pyongyang *Marathon* didokumentasikan secara terstruktur, Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga menjadi saksi visual atas suasana kota Pyongyang, estetika arsitektur sosialis, dan keramah tamahan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menggunakan dokumentasi visual maraton, seperti foto dan video peserta asing yang tersenyum dan menikmati suasana, untuk menyebarkan pesan tentang keamanan, keterbukaan, dan modernitas Korea Utara mulai dari peserta asing yang bersorak di dalam Kim Il Sung Stadium, warga lokal yang memberikan semangat di sepanjang jalan, hingga latar belakang arsitektur monumental kota Pyongyang seperti *Arch of Triumph*, Kim Il Sung *Square*, dan *Mirae Scientists Street*. Rute lari yang dipilih bukan sekadar untuk kenyamanan pelari, tetapi sarat dengan simbolisme politik dan budaya.

Visualisasi ini disusun untuk menciptakan optik yang menyampaikan pesan bahwa Korea Utara adalah negara yang damai dan progresif. Sebagai contoh, peserta asing yang tersenyum saat berlari di jalan raya yang bersih, atau berfoto dengan warga lokal yang tampak antusias, memberi kesan keterbukaan dan keramahan yang mungkin bertolak belakang dengan narasi media Barat. Namun,

semua visual ini merupakan bagian dari narasi yang telah dikurasi oleh negara mulai dari rute yang boleh dilalui, hotel yang diizinkan untuk diinapi, hingga pemandu lokal yang selalu mendampingi. Salah satu aspek penting dari strategi pencitraan ini adalah penggunaan testimoni peserta asing sebagai bagian dari legitimasi narasi.

Banyak pelari internasional menulis pengalaman mereka di blog, artikel media, atau unggahan media sosial yang menggambarkan kekaguman terhadap keindahan kota Pyongyang, keteraturan acara, dan keramahan warga. Kutipan-kutipan seperti ini sering dikutip kembali oleh media pemerintah untuk memperkuat pesan bahwa Korea Utara adalah negara yang aman dan menyenangkan untuk dikunjungi. Pyongyang *Marathon* juga harus dipahami dalam kerangka diplomasi olahraga, yaitu penggunaan kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan politik atau diplomatik. Menurut Trunkos & Heere, diplomasi olahraga bisa menjadi alat untuk membangun hubungan, menurunkan tensi konflik, atau membentuk citra negara di panggung internasional (Trunkos, Judit, and Heere 2017).

Korea Utara tampaknya menyadari bahwa ajang olahraga berskala internasional dapat menciptakan momen netral bebas dari diskusi politik yang mampu menjangkau *audiens global*. Dengan pendekatan ini, Korea Utara tidak hanya memproyeksikan citra keterbukaan dan perdamaian, tetapi juga memperluas jejaring pariwisata terbatas yang terkendali. Dengan jumlah peserta asing yang meningkat setiap tahun hingga sebelum pandemi COVID-19, Pyongyang *Marathon* menjadi tolok ukur keberhasilan diplomasi olahraga ala Korea Utara.

Berikut adalah grafik peningkatan jumlah peserta asing dalam Pyongyang Marathon sejak 2014 hingga 2025:

Grafik 1. Peningkatan Jumlah Peserta Asing dalam Pyongyang Marathon
2014-2025



Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan laporan The Guardian (2014), Time (2015), Koryo Tours (2016–2017), Koreakonsult (2018–2019), NK News (2020–2024), dan Reuters (2025).

Berdasarkan data tahunan, Pyongyang Marathon menunjukkan tren kenaikan jumlah peserta asing yang signifikan. Media internasional melaporkan bahwa sekitar 225 pelari dari 27 negara berpartisipasi pada edisi 2014, sebuah langkah yang menandai perubahan penting dalam cara Korea Utara menampilkan diri kepada dunia (Koreakonsult 2019). Dalam beberapa tahun selanjutnya, acara tersebut mengalami peningkatan pesat. Agen wisata seperti Koryo Tours dan Young Pioneer Tours mulai mempromosikan paket wisata maraton ke Pyongyang,

dan jumlah peserta asing meningkat dari ratusan hingga hampir seribu orang menjelang 2019(Koryo Group 2019).

Selama periode pandemi 2020–2021, jumlah peserta asing menurun drastis akibat pembatasan perjalanan internasional, namun pada 2022, penyelenggaraan *marathon* kembali menarik peserta asing meski belum mencapai angka pra-pandemi. Tren kenaikan berlanjut pada 2023–2025, menandai konsistensi Korea Utara dalam memanfaatkan Pyongyang *Marathon* sebagai instrumen *soft power* dan diplomasi olahraga.

Melalui pendekatan sistematis ini, Pyongyang *Marathon* menjadi contoh nyata bagaimana olahraga dapat berfungsi sebagai alat diplomasi publik. Melalui narasi keterbukaan selektif, kontrol visual acara, dan pengalaman langsung peserta, Korea Utara berhasil membentuk persepsi internasional secara bertahap. Meskipun dampaknya terhadap kebijakan luar negeri tidak langsung, keberhasilan *marathon* dalam menarik peserta dan media membuktikan efektivitas strategi pencitraan jangka panjang. Terkait hubungan internasional, *marathon* ini memberi Korea Utara peluang untuk memengaruhi persepsi global tanpa konfrontasi langsung.

BAB 3

STRATEGI DALAM DIPLOMASI PUBLIK KOREA UTARA

Bab ini membahas secara mendalam bagaimana Korea Utara memanfaatkan Pyongyang *Marathon* sebagai instrumen diplomasi publik dalam upaya membentuk citra internasionalnya pada periode 2014–2025. Diplomasi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph S. Nye, merupakan bagian dari *soft power* yakni sebagai kekuatan nonkoersif yang memungkinkan suatu negara memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah secara moral. Nye menegaskan bahwa kekuatan lunak suatu negara bersumber dari tiga aspek utama yakni budaya (ketika mampu menarik perhatian masyarakat lain), nilai politik (ketika negara menjalankan prinsip tersebut secara konsisten di dalam dan luar negeri), serta kebijakan luar negeri (ketika dianggap memiliki legitimasi dan otoritas moral) (Nye 2004, 11). Olahraga berfungsi sebagai medium yang menyalurkan ketiga dimensi tersebut melalui interaksi simbolik dan pengalaman bersama yang melampaui batas politik dan ideologis.

Melalui penyelenggaraan Pyongyang *Marathon*, Korea Utara berupaya menampilkan budaya nasional yang teratur, nilai-nilai kolektif, serta kebijakan luar negeri yang menonjolkan citra keterbukaan dan perdamaian. Sejalan dengan gagasan Nye, daya tarik (*attraction*) yang muncul dari aktivitas budaya dan sosial dapat menjadi sumber kekuatan yang lebih efektif daripada ancaman atau paksaan (*coercion*) (Nye 2004, 2). Ketika masyarakat internasional merasakan pengalaman positif di Pyongyang, terbentuklah persepsi bahwa negara tersebut stabil, bersahabat, dan memiliki tatanan sosial yang harmonis. Olahraga berfungsi bukan hanya sebagai kegiatan rekreatif, melainkan juga sebagai saluran diplomasi publik

yang membangun hubungan emosional dan kepercayaan melalui interaksi nonformal.

Nye juga menekankan bahwa efektivitas *soft power* sangat bergantung pada konteks penerimaan dan kemampuan menciptakan ketertarikan yang tulus. Daya tarik yang muncul dari kegiatan budaya seperti Pyongyang *Marathon* tidak bekerja secara langsung, tetapi melalui proses persepsi, pengalaman, dan interpretasi publik global. Oleh karena itu, pemerintah Korea Utara menggunakan maraton ini sebagai sarana mengomunikasikan pesan simbolik kepada dunia yakni bahwa negara tersebut tidak sepenuhnya tertutup, melainkan memiliki semangat kebersamaan dan kemampuan menyelenggarakan acara berskala internasional. Terciptanya ruang interaksi antara warga lokal dan pelari asing, membuat Korea Utara membangun jembatan komunikasi yang memperkuat *image* nasional tanpa harus menggunakan tekanan politik.

Jika ditinjau dari teori Nye, penggunaan olahraga dalam diplomasi publik merupakan upaya untuk menanamkan *milieu goals*, yaitu membentuk lingkungan internasional yang lebih kondusif terhadap penerimaan dan simpati terhadap negara. Pyongyang *Marathon* menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan lunak yang berorientasi pada penciptaan citra, bukan negosiasi formal. Melalui pengalaman langsung, simbol budaya, dan narasi keterbukaan, Korea Utara berusaha memperoleh keuntungan diplomatik dalam jangka panjang, seperti pengakuan, rasa ingin tahu, dan rasa hormat dari komunitas global.

Berlandaskan teori *soft power* Joseph S. Nye, analisis dalam Bab III ini dibagi menjadi tiga bagian utama yang merepresentasikan sumber-sumber utama *soft power* suatu negara, yakni budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri.

1. Bagian pertama, *Pyongyang Marathon* sebagai Representasi *Soft Power* Budaya Korea Utara, membahas bagaimana penyelenggaraan *Pyongyang Marathon* menjadi sarana promosi budaya dan identitas nasional Korea Utara di mata dunia. Subbab ini menelaah bagaimana *event* olahraga ini berfungsi sebagai ruang interaksi simbolik antara warga lokal dan peserta internasional, serta menjadi alat diplomasi budaya yang memperhalus citra negara tertutup tersebut.
2. Bagian kedua, *Pyongyang Marathon* dan *Internalization of Political Values* Korea Utara, menjelaskan bagaimana kegiatan ini dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai politik dan ideologi nasional, baik kepada masyarakat domestik maupun peserta asing. Subbab ini menyoroti dimensi politik yang terinternalisasi dalam penyelenggaraan *marathon*, seperti simbol-simbol kepemimpinan, nasionalisme, dan keteraturan sosial yang menjadi refleksi nilai-nilai utama rezim Korea Utara.
3. Bagian ketiga, *Pyongyang Marathon* dalam Kerangka Kebijakan Luar Negeri Korea Utara (2014–2025), menganalisis posisi dan peran *event* ini dalam konteks kebijakan luar negeri Korea Utara yang berorientasi pada diplomasi publik dan upaya normalisasi citra global. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana olahraga dijadikan instrumen strategis untuk membangun komunikasi lintas budaya dan memperkuat legitimasi Korea Utara di komunitas internasional.

Bab III ini menegaskan bahwa *Pyongyang Marathon* bukan sekadar ajang olahraga, melainkan instrumen *soft power* yang dirancang secara strategis untuk memproyeksikan citra nasional Korea Utara di tengah tekanan politik global.

Melalui kekuatan daya tarik budaya, nilai-nilai kolektif, dan kebijakan luar negeri yang dikemas dalam bentuk pengalaman langsung, Korea Utara berupaya membangun pengaruh yang halus namun signifikan dalam hubungan internasional yakni sebuah praktik nyata dari diplomasi publik dalam kerangka *soft power*.

3.1 Pyongyang Marathon sebagai Representasi *Soft Power* Budaya Korea Utara

Pyongyang Marathon merupakan representasi konkret dari *soft power* budaya Korea Utara yang menunjukkan bagaimana olahraga dimanfaatkan untuk menarik simpati dan perhatian dunia internasional tanpa menggunakan kekuatan koersif. Sejak dibuka untuk peserta asing pada tahun 2014, ajang ini menjadi simbol keterbukaan dan bentuk diplomasi publik yang dikendalikan secara hati-hati oleh pemerintah (The Guardian 2014). Berdasarkan pengalaman travel vlogger Drew Binsky dalam videonya, suasana maraton menggambarkan antusiasme dan keramahan warga lokal yang memberi semangat kepada pelari asing (Binsky 2019). Hal ini menghadirkan kesan bahwa Korea Utara adalah negara yang aman dan bersahabat, bertolak belakang dengan citra negatif yang sering diberitakan media Barat. Event maraton ini berfungsi sebagai alat kultural yang memproyeksikan citra positif Korea Utara kepada publik internasional sejalan dengan konsep *soft power* Joseph Nye, di mana daya tarik budaya menjadi sumber pengaruh yang halus namun efektif dalam membentuk persepsi global (Nye 2004, 11).

Dari perspektif budaya, Pyongyang Marathon menampilkan identitas nasional Korea Utara melalui kombinasi antara seni visual, simbol ideologis, dan interaksi sosial. Drew Binsky menggambarkan bagaimana ribuan warga lokal bersorak dan memberi dukungan di sepanjang jalan, sementara pelari melintasi

landmark monumental seperti Arch of Triumph, Kim Il Sung Square, dan Mirae Scientists Street (Binsky 2019, [04:12]). Rute ini bukan sekadar lintasan olahraga, tetapi panggung visual yang menampilkan kebanggaan nasional dan kemegahan arsitektur sosialis. Pemerintah Korea Utara menggunakan budaya sebagai sarana membangun citra kolektif yang penuh makna dan keharmonisan sosial dengan menghadirkan pengalaman estetis tersebut kepada peserta asing. Seperti dijelaskan Nye (2004, 11–12), budaya menjadi efektif sebagai sumber soft power ketika mampu menampilkan nilai universal dan menciptakan ketertarikan emosional.

Partisipasi internasional dalam Pyongyang Marathon menjadi wujud pertukaran budaya, di mana interaksi antara warga lokal dan pelari asing dirancang untuk menampilkan sisi humanis masyarakat Korea Utara. Drew Binsky mengungkapkan bahwa ia merasa diterima dengan penuh semangat dan tidak mengalami pembatasan selama berlari (Binsky 2019, [06:20]). Momen ini menjadi ruang langka bagi warga asing untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Korea Utara di luar narasi politik. Pemerintah menggunakan momen tersebut untuk menanamkan persepsi keterbukaan sosial yang aman dan positif. Hal ini menunjukkan bagaimana soft power bekerja melalui daya tarik interpersonal yang timbul dari pengalaman nyata, bukan dari propaganda langsung (Nye 2004, 8–9).

Selain aspek budaya, Pyongyang Marathon juga merepresentasikan simbolisme ideologis yang kuat dalam setiap detailnya. Garis awal dan akhir yang berlokasi di Kim Il Sung Stadium bukan hanya pilihan teknis, tetapi juga memiliki makna politis yang menunjukkan sentralitas pemimpin dalam kehidupan nasional (Koryo Group 2019). Landmark yang dilalui pelari menggambarkan stabilitas dan kemajuan sosial yang diinginkan rezim untuk ditunjukkan kepada dunia luar. Hal

ini sejalan dengan penjelasan Nye bahwa budaya dapat menjadi alat diplomasi ketika terhubung dengan nilai politik yang ingin diproyeksikan (Nye 2004, 13).

Ditinjau dari sisi pariwisata dan ekonomi budaya, Pyongyang Marathon juga berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan Korea Utara dengan komunitas global secara selektif. Setiap peserta asing diwajibkan membeli paket perjalanan melalui agen resmi seperti Koryo Tours yang mencakup akomodasi dan kunjungan ke situs budaya tertentu (Koryo Group 2019; Koreakonsult 2019). Sistem ini menciptakan pengalaman wisata yang terkurasi, di mana narasi positif tentang negara disampaikan melalui aktivitas rekreasi. Binsky (2019) menyebutkan bahwa setelah maraton, peserta dapat menikmati suasana santai di area umum bersama warga lokal pengalaman yang jarang terjadi di negara ini. Strategi ini memperkuat cultural attractiveness sebagaimana dijelaskan oleh Nye, bahwa daya tarik budaya sering kali muncul dari pengalaman langsung yang menyenangkan dan tidak politis (Nye 2004, 14).

Dengan demikian, Pyongyang Marathon menjadi bentuk konkret penerapan soft power budaya Korea Utara yang menggabungkan tiga sumber utama menurut Nye — budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Budaya ditampilkan melalui estetika kota dan semangat kolektif masyarakat, sedangkan nilai politik tercermin dari narasi stabilitas dan kedisiplinan nasional. Terciptanya ruang aman dan positif bagi interaksi global menjadikan maraton ini simbol keberhasilan Korea Utara dalam menggunakan olahraga sebagai strategi soft power untuk membangun citra alternatif di mata dunia (Reuters 2019; NK News 2025).

3.2 Pyongyang Marathon dan *Internalization of Political Values* Korea Utara

Maraton Pyongyang bukan sekadar ajang olahraga internasional, melainkan juga instrumen yang secara simbolik digunakan oleh rezim Korea Utara untuk menginternalisasi nilai-nilai politik ke dalam persepsi publik global. Sejak ajang ini dibuka bagi pelari asing pada tahun 2014, penyelenggaraannya menciptakan wahana di mana ideologi nasional seperti *juche*, kolektivisme, dan kesetiaan terhadap pemimpin dikomunikasikan melalui pengalaman langsung peserta dan tontonan publik (The Guardian 2014).

Dalam konteks ini, setiap elemen penyelenggaraan dari rute yang dimulai dan diakhiri di Kim Il Sung Stadium hingga keberadaan pelari asing berinteraksi dengan ribuan warga lokal dirancang untuk memperlihatkan stabilitas, kedisiplinan, dan solidaritas masyarakat Korea Utara. Platform semacam ini menciptakan kesan bahwa masyarakat tersebut berada dalam harmoni, mendukung negara, dan bersatu di bawah kepemimpinan tunggal (Koryo Group 2019).

Menurut teori yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye, nilai politik menjadi salah satu sumber utama soft power ketika suatu negara menjalankan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam perilaku domestik dan luar negeri dan ketika pihak luar menganggap nilai tersebut sah dan menarik (Nye 2004, 13). Dalam kasus Pyongyang Marathon, nilai-nilai politik tersebut diinternalisasikan bukan lewat ceramah atau propaganda formal, melainkan lewat pengalaman pelari asing yang disambut, merasakan atmosfer “normalitas” yang diciptakan oleh pemerintah Korea Utara, dan kemudian membawa persepsi tersebut ke dunia eksternal.

Interaksi antara pelari asing dan warga lokal meskipun dikontrol secara ketat mempunyai efek simbolik penting. Laporan visual menunjukkan pelari menerima

sorakan, dukungan, dan suasana yang tampak ramah saat melintasi jalan-jalan utama Pyongyang (Binsky 2019, [07:15]). Gestur sederhana seperti “high five” warga lokal kepada pelari menjadi perwujudan dari solidaritas yang ditampilkan secara visual dan emosional. Sejalan dengan Nye (2008, 95–96), diplomasi publik melalui pengalaman nyata lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan citra positif dibanding propaganda formal.

Selanjutnya, keterlibatan pelari asing yang menyebarkan kesan positif lewat blog, media sosial atau liputan wisata juga menjadi bagian dari proses political legitimization through perception — di mana legitimasi politik suatu negara dipengaruhi oleh bagaimana publik internasional mempersepsikannya (Nye 2011, 95). Dengan demikian, pengalaman yang dirancang dalam Pyongyang Marathon menjadi medium di mana nilai-nilai politik Korea Utara dirasakan secara langsung oleh orang luar, bukan hanya didengar lewat narasi internal.

Simbolisme dalam penyelenggaraan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai politik. Misalnya, rute yang melintasi landmark-ikon seperti Arch of Triumph dan Mirae Scientists Street bukan hanya estetika kota, melainkan elemen visual yang mengomunikasikan kemajuan, kesatuan nasional, dan kebanggaan rezim (Binsky 2019, [05:10]). Dalam kerangka teori, hal ini mencerminkan bagaimana negara memproyeksikan nilai politiknya melalui “panggung” terbuka yang dilihat oleh pelari dan kemudian oleh media internasional.

Dengan demikian, subbab ini menunjukkan bahwa Pyongyang Marathon berfungsi sebagai instrumen internalisasi nilai politik Korea Utara lewat pengalaman lari internasional, interaksi publik, simbolisme ruang dan tata kota, dan testimoni peserta asing. Melalui kerangka soft power, kegiatan ini menjadi medium

di mana nilai politik Korea Utara tidak hanya dikomunikasikan, tetapi juga dialami, dan kemudian diterjemahkan menjadi persepsi global yang lebih menguntungkan negara.

Sejalan dengan konsep soft power Nye, maraton ini menjadi medium yang menampilkan “nilai politik yang hidup di rumah dan dihormati di luar negeri.” Terciptanya pengalaman yang menyenangkan, penuh kebersamaan, dan bebas dari ketegangan politik, membuat Korea Utara menanamkan citra moral bahwa pemerintahnya mampu menjaga kestabilan dan kebahagiaan rakyat. Meskipun sebagian besar peserta menyadari adanya kontrol ketat, kesan positif yang mereka bawa pulang tetap berkontribusi pada persepsi lunak terhadap rezim. Pyongyang Marathon tidak hanya mencerminkan diplomasi olahraga, tetapi juga menjadi wahana strategis untuk menginternalisasi dan menormalisasi nilai-nilai politik Korea Utara di mata masyarakat internasional.

3.3 Pyongyang *Marathon* dalam Kerangka Kebijakan Luar Negeri Korea Utara (2014–2025)

Ditinjau dari kebijakan luar negeri, Pyongyang Marathon menjadi jalur diplomasi non-tradisional yang berfungsi melunakkan citra politik Korea Utara di mata internasional. Pemerintah tidak menggunakan pendekatan koersif, melainkan memanfaatkan olahraga sebagai ruang komunikasi yang netral dan humanis. Kegiatan ini secara simbolis menunjukkan niat Korea Utara untuk “terlibat” dalam komunitas global tanpa harus mengubah ideologi politiknya. Melalui kerja sama dengan agen wisata seperti Koryo Tours, pemerintah membuka akses terbatas namun signifikan bagi warga asing. Hal ini sesuai dengan konsep Nye bahwa

kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan bermoral dapat meningkatkan daya tarik suatu negara. Pyongyang Marathon menjadi bukti nyata bagaimana Korea Utara menggunakan soft power untuk membentuk opini publik internasional tanpa konfrontasi langsung, sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya di tengah tekanan global (Koryo Tours 2025).

Partisipasi asing dalam ajang ini meningkat signifikan sejak 2014 hingga 2019, sebelum terhenti karena pandemi COVID-19. Menurut *Reuters* (2019), jumlah pelari internasional mencapai sekitar 950 peserta pada 2019 menjadi puncak keterlibatan global. Setelah enam tahun vakum, *NK News* (2025) melaporkan bahwa maraton kembali digelar pada 2025 dengan ratusan peserta asing, memperlihatkan konsistensi Korea Utara dalam memanfaatkan diplomasi olahraga.

Melalui pendekatan sistematis ini, Pyongyang Marathon menjadi contoh nyata bagaimana olahraga dapat berfungsi sebagai alat diplomasi publik. Melalui narasi keterbukaan selektif, kontrol visual acara, dan pengalaman langsung peserta, Korea Utara berhasil membentuk persepsi internasional secara bertahap. Meskipun dampaknya terhadap kebijakan luar negeri tidak langsung, keberhasilan marathon dalam menarik peserta dan media membuktikan efektivitas strategi pencitraan jangka panjang. Terkait hubungan internasional, marathon ini memberi Korea Utara peluang untuk memengaruhi persepsi global tanpa konfrontasi langsung, menunjukkan bahwa bahkan negara yang paling tertutup dapat memanfaatkan diplomasi olahraga untuk memperbaiki citra nasionalnya.

Sejak dibuka bagi peserta asing pada tahun 2014, Pyongyang Marathon juga turut menjadi instrumen kebijakan luar negeri Korea Utara yang berakar pada kekuatan budaya (cultural soft power). Melalui ajang ini, Korea Utara menampilkan

citra bangsa yang beradab, tertib, dan memiliki semangat sportivitas yang universal. Video perjalanan Drew Binsky menggambarkan suasana hangat dan antusias warga lokal yang memberi semangat kepada pelari asing, menciptakan kesan bahwa masyarakat Korea Utara ramah dan mendukung kegiatan internasional. Kegiatan ini juga merefleksikan diplomasi visual yang terencana: rute melintasi Arch of Triumph, Kim Il Sung Square, dan Mirae Scientists Street, yang menampilkan simbol kemajuan dan kebersihan kota (Binsky 2019, [05:10]). Nye (2004, 14) menegaskan bahwa citra positif yang disampaikan melalui kebijakan luar negeri berorientasi damai menjadi pilar utama *soft power*. Pyongyang Marathon mewujudkan prinsip itu melalui citra keterbukaan simbolik, di mana warga asing diperlihatkan “versi terbaik” dari negara tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menelaah bagaimana Korea Utara memanfaatkan *Pyongyang Marathon* sebagai instrumen diplomasi publik dalam periode 2014–2025. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan *Pyongyang Marathon* bukanlah sekadar aktivitas olahraga, tetapi sebuah strategi komunikasi politik yang dirancang secara hati-hati untuk membangun citra positif di tingkat internasional. Korea Utara berusaha menampilkan wajah berbeda dari yang selama ini digambarkan oleh media Barat, yaitu negara yang terbuka, aman, dan memiliki budaya yang kaya.

Maraton ini menjadi sarana representasi citra Korea Utara yang ditampilkan melalui lintasan yang melewati berbagai ikon nasional seperti Menara Juche, Sungai Taedong, dan Kim Il-sung *Square*. Pemilihan rute tersebut jelas bukan kebetulan, melainkan strategi simbolik untuk menekankan kebanggaan nasional dan legitimasi politik. Kehadiran pelari asing sejak 2014 juga menjadi instrumen penting dalam membentuk narasi alternatif mengenai Korea Utara. Testimoni, foto, dan pengalaman pribadi peserta asing yang disebarluaskan melalui media sosial maupun liputan berita internasional menjadi bagian dari diplomasi publik tidak langsung yang memperluas jangkauan pesan Korea Utara. Dengan kata lain, *Pyongyang Marathon* telah menjadi ajang yang mengintegrasikan dimensi olahraga, budaya, dan politik dalam satu paket diplomasi *soft power*.

Selain itu, *Pyongyang Marathon* berfungsi sebagai instrumen *soft power* yang mampu menjembatani isolasi Korea Utara dari dunia internasional. Di tengah

tekanan sanksi ekonomi dan keterasingan diplomatik, *event* ini memungkinkan adanya bentuk keterlibatan dengan komunitas global tanpa melalui jalur negosiasi politik resmi. Teori diplomasi publik yang dikemukakan oleh Joseph Nye dapat digunakan untuk memahami hal ini, di mana olahraga berfungsi sebagai sarana komunikasi lintas negara yang mampu menyampaikan pesan politik dan identitas nasional tanpa melibatkan forum diplomasi formal. Melalui maraton, Korea Utara berusaha menegaskan diri bukan hanya sebagai negara tertutup dengan agenda militeristik, tetapi juga sebagai bangsa yang dapat menampilkan citra persahabatan, keteraturan, dan semangat kemanusiaan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa *event* ini memberikan ruang terbatas bagi interaksi lintas budaya antara masyarakat Korea Utara dengan warga asing. Meskipun interaksi tersebut berada dalam kontrol ketat pemerintah, kehadiran warga lokal yang bersorak di sepanjang jalan dan keterlibatan penonton dalam memberi dukungan kepada pelari asing menciptakan gambaran kebersamaan yang unik. Hal ini memperkuat fungsi maraton sebagai sarana membangun jembatan kultural dan mengurangi sekat ideologis yang selama ini mendominasi hubungan Korea Utara dengan dunia luar. Namun demikian, berdasarkan data hingga 2025, dapat dipahami bahwa *Pyongyang Marathon* belum mampu menghasilkan bentuk kerja sama politik yang konkret dengan negara lain. Diplomasi olahraga yang dijalankan masih sebatas komunikasi simbolik dan representasi citra, bukan sarana negosiasi atau pembentukan perjanjian formal.

Secara keseluruhan, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa *Pyongyang Marathon* menjadi instrumen diplomasi publik yang diarahkan untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara, memperkuat legitimasi domestik, dan

menawarkan ruang keterlibatan dengan komunitas global dalam kerangka *soft power*. Meskipun dampaknya terhadap perubahan kebijakan luar negeri Korea Utara masih terbatas, *event* ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk persepsi global dan menyediakan alternatif jalur diplomasi yang tidak konfrontatif.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, dari sisi akademis, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan memperluas sumber data, misalnya melalui wawancara dengan peserta Pyongyang *Marathon* atau analisis media sosial secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya mengenai bagaimana citra Korea Utara benar-benar terbentuk melalui pengalaman individual para pelari asing. Studi komparatif dengan *event* olahraga di negara lain juga perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana strategi diplomasi publik Korea Utara memiliki kesamaan atau perbedaan dengan konteks global.

Kedua, dari sisi praktik diplomasi, Korea Utara perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pyongyang *Marathon*. Meskipun acara ini berhasil menarik perhatian dunia, kredibilitasnya masih sering dipertanyakan karena kontrol yang sangat ketat terhadap peserta asing maupun media internasional. Jika Korea Utara ingin menjadikan Pyongyang *Marathon* sebagai instrumen diplomasi publik yang berkelanjutan, maka keterlibatan yang lebih luas, inklusif, dan terbuka akan sangat diperlukan. Hal ini juga akan memperbesar peluang terciptanya kepercayaan internasional yang selama ini menjadi kendala utama dalam hubungan Korea Utara dengan dunia luar.

Ketiga, dari perspektif komunitas internasional, *Pyongyang Marathon* sebaiknya dipandang bukan hanya sebagai alat propaganda rezim, tetapi juga sebagai peluang diplomasi alternatif. Negara-negara lain, organisasi internasional, maupun aktor non-negara dapat menjadikan maraton ini sebagai salah satu jalur untuk memperluas interaksi dengan Korea Utara di luar isu politik keras. Jika dimanfaatkan dengan tepat, diplomasi olahraga semacam ini dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih damai dan konstruktif di tengah ketegangan politik global.

Dengan demikian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa *Pyongyang Marathon* harus terus dikembangkan bukan hanya sebagai agenda olahraga rutin, tetapi juga sebagai ruang diplomasi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada perdamaian. Bagi dunia akademik, maraton ini dapat menjadi bahan penelitian yang terus relevan untuk memahami hubungan antara olahraga, diplomasi publik, dan *soft power*. Bagi Korea Utara sendiri, *event* ini bisa menjadi simbol perubahan citra yang berkelanjutan apabila dijalankan dengan konsistensi dan keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Binsky, Drew. 2019. "Running a Marathon in North Korea (What It's Like)." *YouTube Video*, April 14, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=3f9lYx0hDL0>
- Binsky, Drew. 2024. "I Ran in the Pyongyang Marathon (North Korea)." *Travel Blog*. <https://world.drewbinsky.com/i-ran-in-the-pyongyang-marathon-north-korea/>
- Black, David, and Janis Van der Westhuizen. 2004. "The Allure of Global Games for 'Semi-Peripheral' Politics and Spaces: A Research Agenda." *Third World Quarterly* 25 (7): 1195–1214.
- Bonner, Bryan. 2015. "North Korea Bans Foreigners from Pyongyang Marathon over Ebola Fears." <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/north-korea-bans-foreigners-from-its-annual-marathon-race>.
- Brannagan, Paul M., and Richard Giulianotti. 2015. "Soft Power and Soft Disempowerment: Qatar, Global Sport and Football's 2022 World Cup Finals." *Leisure Studies* 34 (6): 703–719.
- Cathcart, A. 2015. "Marathon Diplomacy: North Korea's Soft Power Strategy." *Asia-Pacific Review* 22 (1): 123–137.
- Cathcart, Adam. 2020. "Symbolic Diplomacy and the Pyongyang Marathon." *International Journal of Sport Policy* 12: 45–62. <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1728511>.
- Choe, Sang-Hun. 2021. "North Korea's Athletes and the Politics of Sports Diplomacy." *The New York Times*, 23 July 2021. <https://www.nytimes.com/2021/07/23/world/asia/north-korea-olympics-diplomacy.html>
- Cull, Nicholas J. 2009. *Public Diplomacy: Lessons from the Past*. Los Angeles: Figueroa Press.
- Grix, Jonathan, and Barrie Houlihan. 2014. "Sports Mega-Events as Part of a Nation's Soft Power Strategy: The Cases of Germany (2006) and the UK (2012)." *British Journal of Politics & International Relations* 16 (4): 572–596. <https://doi.org/10.1111/1467-856X.12017>.
- Grix, Jonathan, and Donna Lee. 2013. "Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction." *Global Society* 27 (4): 521–536.
- Kim, Seong-chol. 2018. "Symbolism and Soft Power: The Pyongyang Marathon in North Korea's Diplomacy." *East Asian Review* 25 (2): 99–120.

- Koreakonsult. 2019. "Pyongyang International Marathon." Accessed October 2025. https://www.koreakonsult.com/Attraction_marathon_eng.html
- Koryo Group. 2019. "The Pyongyang Marathon Review." *Koryo Group Blog*, 17 February 2019. <https://koryogroup.com/blog/the-pyongyang-marathon-review-register>.
- Koryo Tours. 2023. "Pyongyang Marathon Route and Event Information." Koryo Group Travel Archive. <https://koryogroup.com>.
- Koryo Tours. 2025. "Pyongyang International Marathon 2025." Accessed October 28, 2025. <https://koryogroup.com/tours/dprk-north-korea/pyongyang-marathon>.
- Lee, Jae-seung. 2019. "The Role of Sports in North Korea's Nation Branding." *International Journal of Korean Unification Studies* 28 (1): 53–77.
- Manzenreiter, Wolfram. 2010. "The Beijing Games in the Western Imagination of China: The Weak Power of Soft Power." *Journal of Sport and Social Issues* 34 (1): 29–48.
- Murray, Stuart, and Geoffrey Pigman. 2014. "Mapping the Relationship Between International Sport and Diplomacy." *Sport in Society* 17 (9): 1098–1118.
- Murray, Stuart. 2010. "Sports Diplomacy: A Hybrid of Two Halves." *Sport in Society* 13 (9): 1213–1226.
- Murray, Stuart. 2011. "Sports-Diplomacy: A Hybrid of Two Halves." *Participant Papers, The International Symposium on CD*.
- NK News. 2024. "North Korea Cancels Pyongyang Marathon for Fifth Straight Year." *NK News*, 23 January 2024. <https://www.nknews.org/2024/01/north-korea-cancels-pyongyang-marathon-for-fifth-straight-year/>.
- NK News. 2025. "Pyongyang Marathon Returns after 6-Year Hiatus with Hundreds of Foreign Athletes." *NK News*, 7 April 2025. <https://www.nknews.org/2025/04/pyongyang-marathon-returns-after-6-year-hiatus-with-hundred-of-foreign-athletes/>
- Nye, Joseph S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Nye, Joseph S. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 616 (1): 94–109
- Reuters Staff. 2019. "Tourist Numbers Double at North Korea Marathon." *Reuters*, April 7, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-marathon-idUSKCN1RI02G>

- Reuters Staff. 2025. "North Korea Holds First Pyongyang International Marathon in Six Years." *Reuters*, 6 April 2025.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-holding-first-pyongyang-marathon-six-years-2025-04-06/>
- Smith, Josh. 2018. "Inside the Spectacle and Symbolism of North Korea's Mass Games." *Reuters*, 12 September 2018.
<https://www.reuters.com/article/world/inside-the-spectacle-and-symbolism-of-north-koreas-mass-games-idUSKCN1LM0LD>
- Stephens, Zoe. 2018. "Pyongyang Marathon: The Closest Experience to Being in the Olympics." *Koryo Tours Blog*, December 2018.
<https://koryogroup.com/blog/pyongyang-marathon-the-closest-experience-to-being-in-the-olympics>
- The Guardian. 2014. "North Korean Marathon Opens Streets to Foreigners – but No Flags Please." *The Guardian*, April 13, 2014.
<https://www.theguardian.com/world/2014/apr/13/north-korean-marathon-pyongyang-foreigners>.
- Town, Sarah. 2019. "Mass Games and the Construction of Collective Identity in North Korea." *Asian Theatre Journal* 36 (1): 42–65.
<https://muse.jhu.edu/article/721547>
- Trunkos, Judit, and Bob Heere. 2017. "Sport Diplomacy: A Conceptual Framework." In *Sport and Foreign Policy in a Globalizing World*, edited by Steven J. Jackson and Stephen Haigh, 21–36. London: Routledge.
- Trunkos, Judit, and Bob Heere. 2017. "Sport Diplomacy: A Review of How Sports Can Be Used to Improve International Relationships." In *Case Studies in Sport Diplomacy*.
- Xu, Guoqi. 2006. *Olympic Dreams: China and Sports, 1895–2008*. Cambridge: Cambridge University Press.